



Badai kenaikan harga bahan pokok tiap tahun

Muhammad Mufti Mubarok^{1*}

¹ Hayam Wuruk Perbanas University, Surabaya, East Java, 60296, Indonesia

*Korespondensi: mufti.mubarok@bpkn.go.id

Diterima: 20 Juni, 2024

Disetujui: 30 Agustus, 2024

ABSTRAK

Latar Belakang: Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beberapa pulau besar dan pulau-pulau kecil. Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2021 adalah 272,68 juta jiwa dan meningkat menjadi 275,77 juta jiwa pada tahun 2022. Peningkatan jumlah penduduk ini berkorelasi dengan kebutuhan bahan pokok bagi konsumen di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kenaikan harga bahan pokok dan mengidentifikasi upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kenaikan bahan pokok sebagai bentuk perlindungan konsumen. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui diskusi publik dengan narasumber. Narasumber yang terlibat dalam penelitian ini adalah kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Perdagangan RI, APDI (Asosiasi Pedagang Daging Indonesia), DPP APRINDO, Perum Bulog, Satgas Pangan Mabes Polri, serta perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan perdagangan. Data sekunder diperoleh melalui penelaahan dokumen-dokumen hukum dan peraturan-peraturan yang terkait dengan studi BAPOKTING (bahan pokok dan bahan penting). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif. **Temuan:** Hasil penelitian menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok adalah kondisi geografis, iklim global, penawaran dan permintaan, rantai distribusi barang, munculnya kartel. Upaya yang telah dilakukan pemerintah dari hulu ke hilir adalah menyiapkan champion lokasi, memberikan bimbingan teknis kepada petani hortikultura, membuat tol laut, Selanjutnya dalam pengawasan dan evaluasi dilakukan operasi pasar di setiap daerah secara berkesinambungan. **Kesimpulan:** Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa banyak faktor yang berkontribusi terhadap kenaikan harga komoditas di Indonesia, termasuk tantangan alam, ekonomi, dan logistik. Pendekatan multi-segi yang dilakukan pemerintah, mulai dari memperbaiki praktik-praktik pertanian hingga memantau distribusi, menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan konsumen. Namun, upaya-upaya berkelanjutan diperlukan untuk memastikan stabilisasi harga yang efektif dan berkelanjutan.

KATA KUNCI: bahan pokok; faktor kenaikan harga; upaya pemerintah.

ABSTRACT

Background: Indonesia is an archipelagic country that has several large islands and many small islands. Badan Pusat Statistik (BPS) explains that Indonesia's population in 2021 is 272.68 million people and increases to 275.77 million people in 2022. This increase in population is correlated with the need for basic commodities for consumers in Indonesia. This study aims to analyze the factors of rising prices of basic raw materials and identify efforts made by the government in overcoming the increase in basic raw materials as a form of consumer protection. **Methods:** This study used a qualitative descriptive approach. Data consists of primary data and secondary data. Primary data were obtained through public discussion with resource persons. The resource persons involved in this research are related ministries and institutions, such as the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, APDI (Asosiasi Pedagang Daging Indonesia), DPP APRINDO, Bulog, the National Police Headquarters Food Task Force, as well as companies engaged in distribution and trade. Secondary data is obtained through a review of legal documents and regulations related to the BAPOKTING study (staple and important ingredients). The collected data is then analyzed

Cara Pengutipan:

Faadhilah, A. (2024). Optimalisasi kebijakan perhutanan sosial dalam pengembangan agroforestry lada untuk pengelolaan hutan berkelanjutan di Kabupaten Belitung. *Kemakmuran Hijau: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 92-100. <https://doi.org/.....>

Copyright: © 2024 dari Penulis. Dikirim untuk kemungkinan publikasi akses terbuka berdasarkan syarat dan ketentuan dari the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



descriptively. **Findings:** The results of the study found that the factors that influence the increase in prices of basic commodities are geographical conditions, global climate, supply and demand, distribution chain of goods, the emergence of cartels. Efforts that have been made by the government from upstream to downstream are preparing location champions, providing technical guidance to horticultural farmers, making sea tolls, Furthermore, in supervision and evaluation, market operations are carried out in each region on an ongoing basis. **Conclusion:** The findings suggest that multiple factors contribute to rising commodity prices in Indonesia, including natural, economic, and logistical challenges. The government's multi-faceted approach, from improving agricultural practices to monitoring distribution, demonstrates its commitment to consumer protection. However, ongoing efforts are needed to ensure effective and sustainable price stabilization.

KEYWORDS: staples; factors in price increases; government efforts.

1. Pendahuluan

Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan BPKN RI adalah lembaga yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen (UUPK, Pasal 1 ayat 12). BPKN RI, dibentuk dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen yang berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPKN RI dibentuk berdasarkan amanat UUPK yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen, dan menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), atau pelaku usaha.

Pembangunan ekonomi nasional di era globalisasi harus mampu mendukung pertumbuhan dunia usaha sehingga mampu menghasilkan berbagai macam barang dan/atau jasa yang mengandung teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak, sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa menimbulkan kerugian konsumen. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam suatu wadah negara kesatuan republik Indonesia yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Pasal 1 UU tersebut menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Selain itu, negara menjamin perlindungan konsumen seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Perdagangan, PM-DAG 36 Tahun 2018 tentang pelaksanaan pengawasan perdagangan, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Konsumen yang merasa terlindungi hak-haknya adalah konsumen yang sejahtera. Kelompok konsumen ini akan merasa lebih percaya diri dalam berkonsumsi dan akan cenderung mengkonsumsi lebih banyak, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, kesejahteraan dan pemberdayaan konsumen perlu menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi, salah satunya melalui penerapan kebijakan perlindungan konsumen yang efektif. Upaya perlindungan konsumen juga tertuang dalam Bab IV The United Nations Guidelines for Consumer Protection (UNGCP) yang telah memasukkan serangkaian prinsip-prinsip praktik bisnis yang baik, yang akan memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku usaha untuk menjalankan aktivitasnya baik di pasar offline maupun online. Prinsip-prinsip tersebut adalah: (a) Perlakuan yang adil dan setara; (b) Perilaku komersial; (c) Pengungkapan dan transparansi; (d) Pendidikan dan peningkatan kesadaran; (e) Perlindungan privasi; dan (f) Pengaduan dan perselisihan konsumen.

Konsumen adalah seluruh rakyat Indonesia, hal ini berarti memberikan perlindungan kepada konsumen merupakan bagian dari bentuk perlindungan kepada rakyat Indonesia. Sejalan dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan terhadap konsumen sangat diperlukan untuk melahirkan manusia Indonesia yang sehat, baik secara rohani maupun jasmani sebagai pelaku pembangunan untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional yang juga merupakan sumber pemupukan modal bagi pembangunan, sehingga untuk kelangsungan pembangunan nasional, perlindungan terhadap konsumen mutlak diperlukan. Apalagi mengingat bahwa keberhasilan penyelenggaraan perlindungan konsumen akan mewujudkan cita-cita perekonomian Indonesia yang berdaya saing dan berkeadilan. Keberhasilan perlindungan konsumen sangat tergantung pada kerangka kebijakan yang efektif, konsumen yang berdaya dan kebijakan persaingan usaha yang efektif.

Sebentar lagi umat Islam akan memasuki bulan Ramadhan atau bulan puasa. Tak pelak, hal ini juga berdampak pada kenaikan harga bahan pokok. Sejumlah harga bahan pokok menjelang Ramadan merangkak naik seiring dengan tingginya permintaan di pasar. Harga kebutuhan pokok cenderung naik menjelang hari raya, seperti Idul Fitri. Penyebab kenaikan harga tersebut karena adanya peningkatan permintaan bahan pokok. "Ada kecenderungan kenaikan harga pangan karena permintaan bahan pokok meningkat". Kenaikan harga pangan atau bahan pokok bukanlah hal yang baru. Harga pangan pada akhir tahun 2021 menjelang Natal dan Tahun Baru rata-rata mengalami kenaikan harga sebesar 0,55 persen dari bulan November 2021, lebih tinggi dari prediksi Bank Indonesia (BI) yang sebesar 0,49 persen pada bulan Desember 2021.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pelabuhan. Pelabuhan merupakan salah satu lokasi keluar masuknya barang dari luar dan dalam negeri. Hal ini membuat Indonesia memiliki letak yang strategis dalam jalur lalu lintas pasar internasional. Mengingat ketersediaan bahan baku dalam negeri saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia. Oleh karena itu, secara tidak langsung Indonesia juga bergantung pada negara tetangga dalam hal penyediaan bahan baku. Namun, Indonesia harus menghadapi situasi geopolitik dan tren kenaikan harga bahan baku global. Seperti perubahan iklim di Amerika Latin, Kanada, dan Australia dalam hal pengadaan daging, perang antara Rusia dan Ukraina yang berdampak pada pemasok gandum karena kedua negara tersebut merupakan negara penghasil gandum terbesar di dunia dan kenaikan harga pupuk (naik 131%).

Pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk ini berkorelasi dengan peningkatan kebutuhan konsumen, terutama kebutuhan akan sembako. Sembako merupakan akronim dari Sembilan Bahan Pokok, yaitu beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan daging ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah, dan garam beryodium. Dalam ilmu ekonomi, faktor yang mempengaruhi kenaikan harga pangan disebabkan oleh prinsip supply and demand. Artinya, jika ada permintaan, maka harus ada kegiatan produksi untuk memenuhinya. Selain itu, rantai distribusi barang yang panjang. Ilustrasi yang bisa dibuat adalah berapa lama proses perpindahan barang kebutuhan pokok dari produsen ke konsumen? Barang dari produsen dibawa ke supplier, kemudian supplier membawa ke distributor, dan dari distributor didistribusikan ke pasar besar, lalu dari pasar besar ke pedagang kecil. Ilustrasi tersebut dapat menggambarkan bahwa biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dan menjadi lebih tinggi lagi jika produksi jauh dari pasar distributor. Pengaruh perubahan iklim global juga berdampak pada kenaikan harga pangan, terutama pada saat perayaan hari raya. Saat kondisi iklim berubah, terkadang musim kemarau lebih panjang dari musim hujan atau sebaliknya, musim kemarau lebih pendek dari musim hujan. Hal ini menyebabkan petani merasa kebingungan menentukan jenis tanaman yang sesuai dan tidak mengalami kerugian saat panen hingga kelangkaan dan akhirnya harga komoditas tersebut menjadi tinggi dikalangan konsumen.

Ketika permintaan agregat tinggi, tidak jarang istilah Kartel muncul. Kartel adalah gabungan dari beberapa produsen independen yang menimbun barang untuk mengendalikan pasar. Pelaku kartel akan memainkan harga dengan cara menimbun banyak hasil panen hingga stok di pasar menipis, kemudian menetapkan harga setinggi mungkin untuk mendapatkan keuntungan. Ini memang cara yang kotor untuk mengeruk keuntungan pribadi, namun orang-orang dengan perilaku seperti ini masih banyak berkeliaran di tengah-tengah konsumen Indonesia. Namun, pemerintah tidak tinggal diam dengan masalah ini. Setiap tahun, pemerintah mengadakan operasi pasar untuk mengecek harga kebutuhan pokok dan menelusuri penyebab kenaikan harga pangan. Jika kenaikan harga produk disebabkan oleh kartel, maka pemerintah dan pihak berwajib tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi dan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif digunakan karena merupakan metode yang menitikberatkan pada pengamatan secara mendalam. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian yang lebih komprehensif terhadap suatu fenomena. Penelitian ini dimulai dari pengumpulan data-data terkait melalui internet dan literatur lainnya, diskusi publik (Focus Group Discussion) dan melakukan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan terkait. Selain itu, diskusi publik juga dilakukan oleh ICC (Indonesia Consumer Club) yang mengundang K/L terkait, seperti Kementerian Perdagangan RI, APDI, DPP APRINDO, dan Bulog.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil diskusi dengan Indonesia Consumer Club (ICC), diketahui bahwa setiap tahun terjadi kenaikan harga bahan pokok. Tantangan yang dihadapi dalam menstabilkan harga dan pasokan bahan pokok adalah meningkatnya permintaan agregat, situasi geopolitik dan tren kenaikan harga pangan global, serta pengelolaan komoditas hortikultura yang bersifat musiman. Setiap tahun di bulan April mulai dari tahun 2020 hingga 2022, harga beberapa bahan pokok selalu mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya, antara lain harga daging sapi, minyak goreng kemasan, dan minyak goreng curah.

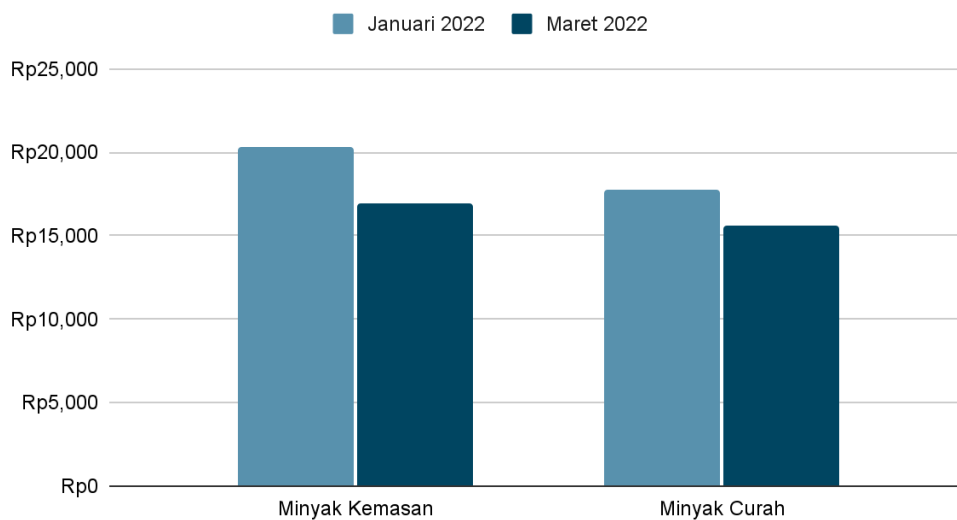
Pada tahun 2022, kenaikan harga kedelai disebabkan oleh tingginya transmisi harga internasional akibat produksi yang kurang optimal di Amerika Utara dan Amerika Latin karena faktor cuaca dan peningkatan permintaan dari China. Selain itu, harga paritas impor kedelai telah mencapai Rp11.677/kg sementara harga yang diterima pengrajin dari Kopti rata-rata Rp11.583/kg. Sedangkan untuk Cabai, pada tahun yang sama, kenaikan disebabkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga tanaman gagal berbuah dan panen tertunda, sementara permintaan mulai meningkat. Kenaikan bawang merah pada tahun 2022 juga disebabkan oleh curah hujan yang tinggi yang menyebabkan tanaman di sentra produksi rusak, sehingga produktivitas turun sekitar 50 persen menjadi hanya 4 Ton/Ha.

Upaya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini beragam. Pemerintah menyediakan program Bantuan Penggantian Selisih Harga Pembelian Kedelai di tingkat perajin tahu tempe sebesar Rp1.000/kg dengan sumber anggaran CSHP. Sasaran penerima bantuan adalah anggota KOPTI sesuai dengan data Kementerian Koperasi dan UKM. Bulog juga akan menyalurkan kedelai dengan jumlah maksimal selama 4 bulan dan akan dievaluasi setiap bulannya. Selanjutnya, upaya mitigasi yang dilakukan untuk mengatasi kenaikan harga bawang merah adalah dengan mendorong penggunaan fasilitas Sistem Resi Gudang (SRG) berteknologi CAS di daerah sentra produksi Brebes dan meningkatkan pasar lelang komoditas agro di wilayah tersebut sebagai upaya menciptakan

tata niaga yang lebih baik melalui mekanisme pembentukan harga dan peningkatan efisiensi pemasaran.

Harga minyak goreng juga mengalami fluktuasi, pada Januari 2022 sempat menyentuh harga Rp20.279/L untuk kemasan dan Rp17.726 untuk minyak curah, kemudian mengalami penurunan di bulan Maret 2022, dengan harga Rp16.965/L untuk kemasan dan Rp15.583/L untuk minyak curah. Terkait perkembangan stabilisasi dan ketersediaan minyak goreng, Kementerian Perdagangan pada bulan Maret 2022 telah menetapkan Permendag Nomor 11 Tahun 2022, yang mencabut ketentuan Permendag 06 Tahun 2022 tentang HET minyak goreng. Dalam Permendag tersebut, Menteri Perdagangan mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Curah sebesar Rp14.000/L atau Rp15.500/L. Selain itu, pedagang eceran yang menjual Minyak Goreng Curah secara eceran kepada konsumen wajib mengikuti HET Minyak Goreng Curah. Konsumen tersebut adalah masyarakat, usaha mikro dan usaha kecil. Menteri Perdagangan juga melarang industri menengah dan besar, termasuk pengemasan, untuk menggunakan minyak goreng curah.

Januari 2022 and Maret 2022



Gambar 1. Harga minyak

Pada tahun berikutnya, Kementerian Perdagangan (2022) menyebutkan bahwa harga rata-rata nasional bahan baku kedelai lokal pada Maret 2022 naik 5,59% dibandingkan bulan sebelumnya menjadi Rp12.988/kg, kemudian naik lagi menjadi Rp13.299/kg pada April 2022, dan turun menjadi Rp13.107/kg pada Mei 2022. Selanjutnya, bahan baku bawang merah pada Maret 2022 mengalami kenaikan menjadi Rp35.370/kg, atau naik 3,77% dibandingkan bulan sebelumnya. Pada April 2022, bawang merah kemudian mengalami penurunan sebesar 3,37% dan mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada Mei 2022 sebesar 16,88% menjadi Rp39.948/kg. Bahan baku cabai merah juga mengalami pasang surut pada periode Maret-Mei 2022. Pada Maret 2022, harga rata-rata nasional cabai merah di pasar domestik mengalami kenaikan sebesar 28,45% dari bulan sebelumnya, menjadi Rp49.917/kg. Pada April 2022, harga cabai merah kembali naik menjadi Rp50.411/kg, kemudian turun pada Mei 2022 menjadi Rp42.229/kg.

Perubahan harga bahan baku dipengaruhi oleh berbagai faktor. Engkus (2017) menyatakan bahwa hukum permintaan dan penawaran, penimbunan barang, kinerja suplai yang terganggu, dan gaya hidup yang lebih konsumtif mempengaruhi harga bahan baku. Hukum permintaan dan penawaran mempengaruhi harga. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan harga pada bulan Mei 2022, aktivitas masyarakat mulai meningkat sehingga permintaan bawang merah juga meningkat, namun pasokan yang ada tidak mencukupi.

Kedua, panjangnya rantai distribusi bahan pokok. Rantai distribusi yang panjang dapat berpengaruh pada menurunnya kualitas pangan dan kurangnya ketersediaan pangan dalam memenuhi jumlah yang cukup aman dan bergizi. Selain itu, peralatan untuk memindahkan barang dari bongkar muat di pelabuhan masih belum memadai dan transportasi serta kemacetan jalur darat membuat rantai distribusi menjadi tidak efektif (Sukartiningsih et al., 2014).

Iklm juga mempengaruhi naik turunnya harga pangan. Cuaca mempengaruhi pertumbuhan tanaman pangan, misalnya pada saat musim hujan. Curah hujan yang tinggi dapat merusak tanaman sehingga gagal panen dan mengakibatkan hasil panen yang rendah (Putra, 2014). Hasil panen yang rendah dapat mengakibatkan ketimpangan antara pasokan dan permintaan pangan, sehingga terjadi kenaikan harga karena terbatasnya pasokan. Hal ini diperparah dengan pengelolaan komoditas hortikultura musiman yang belum optimal (Kementerian Perdagangan, 2022). Selain bahan baku lokal, iklim juga memengaruhi komoditas yang bergantung pada impor, seperti kedelai, gandum, dan daging sapi. Komoditas yang rentan terhadap kenaikan harga bahan pokok adalah komoditas impor seperti tepung terigu, kedelai, dan gula. Komoditas ini perlu diawasi dalam penyediaan pasokan dan distribusinya, karena terjadi gangguan pada rantai nilai dunia.

Faktor-faktor yang ditemukan, sebagian besar, telah diatasi oleh pemerintah melalui upaya-upaya strategis. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah kenaikan harga ini. Pertama, pemerintah telah melakukan operasi pasar dengan tujuan untuk memantau ketersediaan bahan pokok di pasar agar kebutuhan konsumen tetap tercapai. Selain itu, bertujuan untuk mengendalikan dan menjaga stabilitas harga pangan di pasar. Dalam kegiatan ini, pemerintah daerah berinteraksi langsung dengan para penjual di pasar untuk mengetahui ketersediaan dan stabilitas harga. Sementara itu, untuk mengatasi kenaikan harga bahan pokok akibat iklim, di hulu pemerintah telah melakukan kegiatan pengarahannya atau bimbingan teknis kepada para petani tanaman hortikultura. Dengan tujuan untuk meningkatkan provinsi bahan pokok agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia.

Cabai merupakan salah satu bahan pangan yang sering mengalami lonjakan harga. Melihat fenomena tersebut, pemerintah menyiapkan strategi khusus dalam mengatasi lonjakan harga cabai dengan menyiapkan buffer stock pasokan cabai untuk mengamankan Hari Kesiapan Bencana Nasional (HKBN) 2022 dan mengantisipasi tahun 2023. Buffer stock menjelang Ramadhan dan Idul Fitri dilakukan melalui pengaturan pasokan pasar sehingga diharapkan dapat menjaga stabilitas harga di Jabodetabek khususnya Pasar Induk Kramat Jati. Kemudian melakukan pengaturan tanam (luas lahan, waktu panen, dan proyeksi panen) di 10 kabupaten lokasi Champion yang dimonitoring langsung oleh pusat, yaitu Sumedang, Garut, Cianjur, Magelang, Kebumen, Banjarnegara, Kulonprogo, Kulonprogo, Temanggung, Malang, dan Lombok Timur. Sektor hulu juga memegang peranan penting, sehingga para petani khususnya petani cabai diberikan bimbingan teknis dalam rangka mendukung keamanan stok penyangga HKBN.

Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Dengan luasnya wilayah Indonesia ini, tidak jarang jarak antara satu daerah dengan daerah lainnya menjadi faktor penting dalam rantai distribusi. Ketersediaan bahan pokok di luar pulau Jawa tidak semudah dan semurah di pulau Jawa. Untuk mendistribusikan bahan pokok juga membutuhkan waktu dan transportasi yang memadai. Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan, maka alat transportasi yang efisien adalah kapal laut. Distribusi membutuhkan waktu yang lama dan proses yang sulit, sehingga harga bahan pokok di luar Jawa menjadi lebih mahal. Oleh karena itu, Pemerintah membuat tol laut, sehingga kapal sebagai moda transportasi bahan pokok menjadi lebih cepat dan mudah berlayar ke seluruh pelosok negeri. Dengan demikian, kenaikan harga bahan pokok dapat ditekan seperti pada tahun 2018 ketika harga barang di beberapa lokasi di luar Jawa mengalami penurunan sebesar 20 hingga 30 persen dan tercapainya perlindungan hak-hak konsumen berupa terpenuhinya kebutuhan konsumen khususnya bahan pokok pangan.

Langkah yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah dengan menjaga ketersediaan bahan pokok. Kementerian/Lembaga terkait juga harus melakukan langkah antisipatif

untuk menghadapi lonjakan harga yang biasanya terjadi pada saat perayaan hari besar. Dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok, khususnya minyak goreng, sinergi antar Kementerian/Lembaga terkait diharapkan dapat mengatasi kelangkaan bahan pokok yang terjadi di pasar. Banyak hal yang diharapkan dalam sinergi ini baik dalam rangka persiapan, ketersediaan, pengendalian harga, dan siap melakukan intervensi jika terjadi kenaikan harga yang mendadak dan tidak wajar. Tidak kalah penting adalah pemantauan dan pengawasan di lapangan, dan bila perlu ada penegakan hukum terutama bagi pedagang yang melakukan kejahatan ekonomi seperti penimbunan, pengoplosan atau memasukan produk palsu atau ilegal pada produk asli atau legal.

Seluruh masyarakat Indonesia yang menjadi konsumen diimbau untuk tidak mudah melakukan aksi “panic buying”. Umumnya tindakan ini dilakukan oleh konsumen yang memiliki jumlah uang yang lebih besar pada saat itu. Sehingga konsumen yang tidak memiliki sejumlah uang pada saat itu tidak bisa mendapatkan kebutuhan pokok. Tindakan ini sangat berdampak pada ketersediaan sembako di pasar dan dapat merugikan konsumen lain yang tidak mendapatkan sembako sesuai dengan harga jual yang telah ditetapkan. Kerugian konsumen ini diatur dalam Pasal 4 huruf b UUPK.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Terkait peredaran minyak, pemerintah dapat mendorong percepatan pemerataan distribusi minyak bersubsidi ke pasar-pasar tradisional di seluruh wilayah, dan memastikan pedagang mendapatkan minyak dari distributor pertama sehingga dapat dijual dengan harga yang tidak melebihi HET hingga sampai ke tangan konsumen akhir.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap tahun bahan pokok mengalami kenaikan harga. Terutama menjelang, saat, dan setelah hari besar keagamaan nasional, terutama pada bulan Ramadhan. Data yang disajikan menjadi bukti bahwa terjadi dinamika naik turunnya harga bahan pokok di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, geografis, iklim global, penawaran dan permintaan, rantai distribusi barang, dan munculnya kartel. Komoditas pokok yang rentan mengalami kenaikan harga adalah kedelai, bawang merah, dan cabai.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah dari hulu ke hilir adalah menyiapkan champion lokasi dari beberapa komoditas yang rentan mengalami kenaikan harga seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih. Tidak lupa juga memberikan bimbingan teknis kepada para petani khususnya pertanian hortikultura. Kemudian pada rantai distribusi, pemerintah telah memperbaiki infrastruktur dengan membangun tol laut untuk memperlancar distribusi bahan baku ke seluruh wilayah Indonesia. Sehingga dapat menekan harga bahan pokok di luar Pulau Jawa dan tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagai konsumen. Selanjutnya dalam pengawasan dan evaluasi, dilakukan operasi pasar di setiap daerah secara berkesinambungan untuk mengetahui ketersediaan bahan pokok di pasar dan menstabilkan harga bahan pokok sesuai dengan HET masing-masing komoditas.

Kontribusi Penulis

Semua penulis berkontribusi penuh atas penulisan artikel ini.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

Pernyataan Dewan Peninjau Etis

Tidak berlaku.

Pernyataan *Informed Consent*

Tidak berlaku.

Pernyataan Ketersediaan Data

Tidak berlaku.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Akses Terbuka

©2024. Artikel ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0, yang mengizinkan penggunaan, berbagi, adaptasi, distribusi, dan reproduksi dalam media atau format apa pun. selama Anda memberikan kredit yang sesuai kepada penulis asli dan sumbernya, berikan tautan ke lisensi Creative Commons, dan tunjukkan jika ada perubahan. Gambar atau materi pihak ketiga lainnya dalam artikel ini termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel tersebut, kecuali dinyatakan lain dalam batas kredit materi tersebut. Jika materi tidak termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel dan tujuan penggunaan Anda tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan atau melebihi penggunaan yang diizinkan, Anda harus mendapatkan izin langsung dari pemegang hak cipta. Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Daftar Pustaka

- [UU] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39100>
- BPKN RI : Waspada Kenaikan Harga Bahan Pokok Jelang Bulan Ramadan. (2022, March 21). Nonstopnews.id. Retrieved March 3, 2023, from <https://nonstopnews.id/bpkn-ri-waspada-kenaikan-harga-bahan-pokok-jelang-bulan-ramadan>
- Engkus. (2017). Implementasi undang-undang perdagangan dan implikasinya dalam kebijakan pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat. *Jurnal Litigasi*, 18(1), 1-40. <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v18i1.284>
- Erlina, P. (2009). Mengoptimalkan Biaya. Transportasi Untuk Penentuan Jalur. Distribusi. *Jurnal Penelitian Ilmu Teknik* Vo.9 No.2 Desember 2009 hal 143-150
- Hurit, K. (2017). Transportasi secara umum. Erlangga. Jakarta
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2022, April 14). Hadapi Kenaikan Harga Komoditas Energi dan Pangan Global, Pemerintah Pertebal Bantuan Sosial dan Tingkatkan Alokasi Kredit Usaha Rakyat. Retrieved March 3, 2023, from <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4003/hadapi-kenaikan-harga-komoditas-energi-dan-pangan-global-pemerintah-pertebal-bantuan-sosial-dan-tingkatkan-alokasi-kredit-usaha-rakyat>
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat Pasal 1 (Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI, Compiler). (n.d.).
- Miro, Fidel. (2005). Perencanaan Transportasi Untuk Mahasiswa, Perencanaan dan praktisi

- Nasution, M. N. (2008). Manajemen Transportasi, Galia Indonesia Ciawi-Bogor
- Rantai Distribusi Pangan Kepanjangan, Ini Solusi Mentan. (n.d.). Kementerian Pertanian.
<https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=1611>
- Kemendag. (2022). Analisis Perkembangan Harga Bahan Pangan pokok, Barang penting, Ritel Modern, dan E-Commerce di Pasar Domestik dan Internasional – Maret 2022.
<https://bkperdag.kemendag.go.id/referensi/analishbp/view/eyJpZCI6ImVpQ1lVeFFBdnRydndBZVJvTWtlaXc9PSIsImRhdGEiOiJyY2I1In0%3D>
- Kemendag. (2022). Analisis Perkembangan Harga Bahan Pangan pokok, Barang penting, Ritel Modern, dan E-Commerce di Pasar Domestik dan Internasional – Mei 2022.
<https://bkperdag.kemendag.go.id/referensi/analishbp/view/eyJpZCI6lVTXC9EZzdWY0R3ZUNueWFmMytFNVRnPT0iLCJkYXRhIjo1S1E4Si9>
- Kemendag. (2022). Analisis Perkembangan Harga Bahan Pangan pokok, Barang penting, Ritel Modern, dan E-Commerce di Pasar Domestik dan Internasional – April 2022.
<https://bkperdag.kemendag.go.id/referensi/analishbp/view/eyJpZCI6l1pwYzU3VZdmt2ZVpyakxL3NlUzFBPT0iLCJkYXRhIjo1TTFPdy9>
- Kemendag. (2021). Analisis Perkembangan Harga Bahan Pangan Pokok di Pasar Domestik dan Internasional – Maret 2021.
<https://bkperdag.kemendag.go.id/referensi/analishbp/view/eyJpZCI6Ik9hSzc5XC9pVXp4Mnc3NFwvOFVGaUFOQT09liwiZGF0YSI6InpuTFUifQ%3D%3D>
- Kemendag. (2021). Analisis Perkembangan Harga Bahan Pangan Pokok di Pasar Domestik dan Internasional – April 2021.
<https://bkperdag.kemendag.go.id/referensi/analishbp/view/eyJpZCI6l1VDS2hqSStGKzNmS1VvYmFhRlA1WEE9PSIsImRhdGEiOiJzTVNHIn0%3D>
- Kemendag. (2021). Analisis Perkembangan Harga Bahan Pangan Pokok di Pasar Domestik dan Internasional – Mei 2021.
<https://bkperdag.kemendag.go.id/referensi/analishbp/view/eyJpZCI6lmsrdGhnaEplVkpBaEgyTWjacEF4T3c9PSIsImRhdGEiOiJUVHIMIn0%3D>
- Putra, M. I. (2014). Determinasi kenaikan harga pangan di indonesia (Pangan padi kedelai periode 2001-2011). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Univesrsitas Brawijaya. 3(1).
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1387>
- Sukartiningih, Tindangen, M., Gaffar, E. U. A. (2014). Efektivitas mata rantai pendistribusian pangan sebagai upaya ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Timur. Warta Penelitian dan peghubungan. 26(5):531-540.

Biografi Penulis

Muhammad Mufti Mubarok, Hayam Wuruk Perbanas University

- Email: mufti.mubarok@bpkn.go.id
- ORCID:
- Web of Science ResearcherID:
- Scopus Author ID:
- Homepage: